

Fungsionalisme dan Social Drama (Studi Kasus Kondisi Pendidikan di Indonesia Selama Masa Pandemi COVID-19)

Arya Mayadi ^{1*}

^{1*} Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.

*Correspondence email:
Arya012@brin.go.id

Received: 23 November 2023
Accepted: 1 December 2023
Published : 30 December 2023

Daftar lengkap informasi penulis tersedia di akhir artikel.

Abstract

The year 2020 witnessed unprecedented global changes due to the COVID-19 pandemic, profoundly affecting daily life. The education sector, a significant casualty, underwent considerable transformation in Indonesia. Swift government policies highlighted the commitment to prioritize education amid adversity. This study employs both functionalism and Victor Turner's social drama to comprehend the educational shifts during the pandemic. Using a literature review, diverse sources were analyzed through Turner's social drama concept. The pandemic's impact on education unfolded in breach, crisis, redress, and outcome stages. Significant adjustments in learning methods ensued, challenging all stakeholders. A governmental response with new policies aimed to mitigate the crisis. A year later, persistent challenges led to the introduction of the Kurikulum Merdeka. Despite learning disparities, signs of recovery surfaced, attributed to factors like the Kurikulum Merdeka, teacher development, and local government support. While facing challenges, effective implementation of the Kurikulum Merdeka requires comprehensive support. Turner's social drama model provides a nuanced understanding of societal dynamics during crises, complementing functionalism's macro-level focus. Its flexibility enables a productive analysis of societal crises, contributing to a holistic view of societal events.

Keywords: Education; Functionalism; Social Drama; Covid-19.

Abstrak

Tahun 2020 ditandai oleh pandemi COVID-19 yang mengubah dinamika global, termasuk dampak signifikan pada sektor pendidikan di Indonesia. Pemerintah dengan cepat merespon untuk memastikan kelangsungan pendidikan, mencerminkan komitmen terhadap prioritas pendidikan dalam situasi sulit. Penelitian ini menggabungkan pandangan fungsionalisme dan social drama Victor Turner untuk memahami perubahan pendidikan selama pandemi. Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur, dari media online hingga jurnal, menggunakan konsep social drama Turner. Proses sosial selama pandemi di sektor pendidikan terbagi menjadi breach, crisis, redress, dan outcome. Pandemi memaksa perubahan besar dalam pembelajaran, menantang pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan keluarga. Krisis muncul ketika adaptasi sulit dilakukan, tetapi pemerintah berupaya dengan kebijakan baru. Setahun setelahnya, masih ada tantangan, dan pemerintah merespon dengan kurikulum merdeka. Meskipun terdapat kesenjangan pembelajaran, ada indikasi pemulihan, terutama melalui faktor kurikulum merdeka, pengembangan diri guru, monitoring kepala sekolah, dan dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan, pemulihan pendidikan memerlukan dukungan menyeluruh dari sekolah dan pemangku kepentingan daerah untuk menjadikan implementasinya efektif dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan model social drama Turner, dapat dipahami dinamika sosial saat krisis, melengkapi pandangan fungsionalisme yang lebih fokus pada fungsi makro masyarakat. Fleksibilitas social drama memungkinkan analisis krisis masyarakat secara produktif tanpa harus mengikuti setiap fase secara linear. Pemahaman ini berguna untuk melihat dan menganalisis peristiwa dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih holistik.

Kata Kunci: Pendidikan; Fungsionalisme; Social Drama; Covid-19.

1. Pendahuluan

Tahun 2020 menjadi momen besar di abad ke-21, diwarnai oleh pandemi COVID-19 yang mengubah kehidupan global. Pandemi ini tidak hanya tentang kesehatan, tapi juga cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. COVID-19 membuat kita beradaptasi dengan situasi baru. Cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi berubah. Aktivitas yang dulu biasa, seperti bepergian dan bertemu langsung, sekarang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Pandemi ini bukan hanya tentang tantangan, tapi juga pembelajaran. Nilai-nilai seperti ketahanan, kreativitas, dan kerjasama global menjadi pelajaran berharga. Pendidikan, salah satu sektor yang terkena dampak, juga mengalami perubahan. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memastikan pendidikan tetap berjalan. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas, meskipun dalam kondisi sulit. Dalam pandangan Fungsionalisme, pendidikan dianggap sebagai bagian penting dari struktur sosial, bertujuan menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai dan pengetahuan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memberikan kontribusi pada kesinambungan masyarakat. Fungsi Pendidikan di Indonesia dapat dipahami melalui artikel Sujana (2019), berjudul "Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia." Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk tatanan masyarakat yang bermanfaat bagi negara. Sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah, pendidikan menjadi motor utama untuk mencapai berbagai tujuan, mulai dari aspek politik hingga sosial. Pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada Pendidikan, dan peran pemerintah dijelaskan dalam artikel "Peranan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 pada Bidang Pendidikan di Indonesia" (Azhar dan Kartini, 2022). Pemerintah berperan dalam tiga fungsi: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Meskipun dalam pandangannya, fungsionalisme cenderung fokus pada elemen makro, pandangan ini tidak sepenuhnya mencakup dinamika sosial yang melibatkan elemen mikro seperti individu. Maka dari itu, dalam melihat kondisi Pendidikan selama pandemi, pendekatan yang komprehensif bisa ditempuh dengan mempertimbangkan perspektif fungsionalisme dan social drama dari Victor Turner. Ini membantu memahami tidak hanya aspek makro tetapi juga peran individu dalam dinamika proses sosial selama krisis.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode studi Pustaka, yang dilakukan dengan mengambil data-data dari berbagai macam literatur, mulai dari media berita online, jurnal dan juga artikel, lalu menganalisisnya dari pandangan *social drama* menurut Victor Turner, yaitu rentetan episode dari sebuah ketegangan, konflik, atau krisis yang terjadi di masyarakat, yang dapat diisolasi, di pisah-pisahkan, disekat, dan bisa dijelaskan dengan rinci setiap proses sosialnya (Turner, 1974).

Turner membagi setiap episode dalam social drama-nya menjadi 4 bagian, yaitu: (1) Breach; (2) Crisis; (3) Redress; dan (4) Outcome. Breach disini Turner definisikan sebagai "Breach of regular" (Turner, 1974: 38), atau terjadinya "pelanggaran" pada norma sosial yang terjadi didalam masyarakat, bisa terjadi pada orang atau kelompok dalam sistem hubungan sosial yang sama, baik itu desa, perkotaan, kantor, pabrik, universitas, atau kumpulan sistem atau bidang interaksi sosial lainnya (Turner, 1974: 38). Social Drama menurut Turner berawal dari adanya "a visible breach" (Turner, 1982: 246) di dalam keteraturan atau norma dan regulasi yang ada di dalam kelompok masyarakat, dan apapun motif dari "breach" tersebut, kelompok masyarakat harus menyadari bahwa hal tersebut terjadi di antara kelompok masyarakat dan mengganggu kesatuan dan keberlangsungan hidup kelompok masyarakat (Turner, 1982). Jika disimpulkan maka breach di sini dapat diinterpretasikan sebagai suatu insiden atau kejadian yang terjadi dalam kelompok masyarakat, baik itu di lingkungan perkotaan, pedesaan, universitas, pemerintahan, atau berbagai sistem atau bidang interaksi sosial lainnya. Dimana dalam konteks ini, peristiwa tersebut terlihat dengan jelas melanggar norma, mengubah kebiasaan, dan mengganggu kesatuan serta keberlangsungan hidup kelompok masyarakat.

Setelah terjadi suatu breach, fase selanjutnya yang disebut oleh Turner sebagai "a phase of mounting crisis" atau fase crisis (Turner, 1974: 38), fase crisis ini terjadi ketika potensi penyebaran dan perluasan pada breach meningkat, kecuali jika breach dapat segera diatasi di area kecil dan terbatas dalam interaksi sosial yang luas. Kondisi ini menciptakan jarak di antara individu dalam kelompok masyarakat dan membentuk fraksi-fraksi di dalamnya. Saat kelompok terbagi menjadi

beberapa bagian, individu kemudian harus memilih sisi yang akan diambil, dan di dalam fase ini, konflik mungkin timbul di dalam kelompok masyarakat (Turner, 1974; 1982).

Turner menjelaskan bahwa dalam fase kedua ini, fase crisis, selalu menjadi salah satu titik balik atau momen berbahaya dan penuh ketegangan, di mana keadaan yang sebenarnya terungkap, dan saat yang paling sulit untuk menyembunyikan identitas sejati atau berpura-pura bahwa tidak ada masalah dalam kelompok tersebut (Turner, 1974). Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fase crisis adalah terjadinya sebuah perpecahan, atau terbentuknya sisi yang saling berlawanan di dalam kelompok masyarakat, atau juga bisa disebut sebagai konflik didalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya breach.

Fase ketiga yang dijelaskan oleh Turner dimulai dengan munculnya representasi dari kesatuan dan kelangsungan kelompok, baik dalam konteks keagamaan, politik, ekonomi, kekeluargaan, atau semua hal yang disatukan. Dalam fase ini, kelompok menggunakan otoritas dan legalitasnya untuk mengisolasi dan membatasi penyebaran konflik dalam batas-batas hukum atau agama, atau keduanya. Guna membatasi penyebaran krisis, beberapa penyesuaian dan mekanisme "redressive," baik yang bersifat informal maupun formal, yang bisa bersifat kelembagaan atau ad hoc, kemudian dilakukan (Turner, 1974;1982).

Menurut Turner, mekanisme yang diterapkan oleh kelompok sosial pada fase redressive ini dapat berupa beragam bentuk, bergantung pada beberapa faktor seperti kedalaman dan signifikansi sosial dari breach yang terjadi, tingkat keterlibatan masyarakat pada fase crisis, karakteristik kelompok sosial, dan juga tingkat otonominya. Ragam bentuk ini dapat berupa nasihat pribadi, mediasi informal, atau penyelesaian sengketa melalui proses yuridis dan hukum formal. Selain itu, mekanisme ini juga mencakup melegitimasi cara-cara penyelesaian alternatif, bahkan hingga pelaksanaan ritual yang dapat dihadiri oleh public (Turner, 1974; 1982).

Pada fase ketiga ini, yang disebut sebagai fase redress, semangat kesatuan digunakan sepenuhnya untuk melawan pelanggaran terhadap norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam fase ini, penilaian terhadap kasus dilakukan sesuai dengan standar hukum tradisional masyarakat, dengan membebaskan atau menghukum pihak yang terlibat. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada standar hukum tradisional masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan penilaian terhadap realitas kontemporer yang senantiasa berubah, serta usaha untuk menyelaraskan standar-standar yang ada (Turner, 1982).

Menurut Turner, pada tahap ketiga dalam social drama ini, upaya untuk mengembalikan perdamaian atau menjaga keseimbangan dalam kelompok masyarakat dapat berhasil atau gagal. Ada berbagai metode yang digunakan dalam proses ini, yang bertujuan untuk memulihkan harmoni dalam kelompok, baik itu dalam skala kecil seperti keluarga atau dalam komunitas yang lebih besar. Keberhasilan atau kegagalan dari upaya ini dinilai melalui analisis kejadian yang relevan dan sebanding. Fase ketiga bisa dianggap berhasil, bahkan jika ada kritik dari individu atau kelompok tertentu, asalkan "pusatnya tetap berdiri" (hal. 47); sebaliknya, kegagalan bisa diukur dari penolakan "struktur" yang masih ada di masyarakat oleh realitas sosial yang ada. Keduanya, baik kegagalan maupun keberhasilan, mewakili diagnosa atau penilaian terhadap kondisi manusia pada suatu rentang waktu tertentu (Turner, 1982).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam fase ketiga, yaitu fase redress dalam teori social drama milik Turner, ini adalah cara bagaimana kelompok sosial masyarakat untuk mengatasi krisis yang mengancam kesatuan dan kelangsungan kelompok mereka. Upaya ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam ranah keagamaan, politik, ekonomi, keluarga, atau kombinasi dari beberapa bidang tersebut. Berbagai bentuk usaha dapat dilakukan, baik dalam bentuk informal maupun melalui proses formal. Keberhasilan atau kegagalan dari fase ini dinilai berdasarkan sejauh mana relevansinya terhadap kondisi aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dengan mempertimbangkan konteks ruang dan waktu yang spesifik. Sebagai contoh, dalam konteks ini, kelompok masyarakat mungkin memilih untuk merespons krisis melalui upaya keagamaan, kebijakan politik, atau langkah-langkah ekonomi, dan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah tersebut bergantung pada sejauh mana langkah-langkah tersebut dapat menanggulangi krisis dan mengembalikan keseimbangan sosial.

Fase puncak dalam social drama menurut Turner mengalami dua tahap terakhir, yaitu *reintegration* dan *legitimization of irreparable schism*. *Reintegration* mengacu pada upaya untuk menggabungkan kembali kesatuan dan menjaga kelangsungan hidup kelompok sosial masyarakat setelah mengalami krisis. Di sisi lain, *legitimization of irreparable schism* merujuk pada pengakuan atas kesepakatan bahwa terdapat pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki, seringkali disertai dengan pemisahan kelompok tertentu (Turner, 1974; 1979; 1982).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Studi Kasus Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia

Fase breach dalam sektor Pendidikan selama masa pandemi COVID-19 dimulai dengan timbulnya kasus penularan pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Indonesia, Joko Widodo, bersama dengan beberapa menteri mengumumkan peristiwa tersebut di Jakarta. Pada saat yang sama, pada tanggal 2 Maret 2020, virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab Covid-19 sudah menyebar ke lebih dari 60 negara. Jumlah kasus Covid-19 yang tercatat mencapai 88.382, dengan Cina (79.826 kasus) dan Korea Selatan (3.736 kasus) memiliki jumlah kasus tertinggi. Italia menempati peringkat keempat dengan 1.694 kasus, diikuti oleh Iran dengan 978 kasus (Nuraini, 2020). Sejak kasus penularan pertama, kemudian ditemukan beberapa kasus lainnya, dan pada 10 April, jumlah kasus positif mencapai 3.512, di mana 306 orang meninggal dunia dan 282 pasien dinyatakan sembuh ("Update Corona," 2020).

Kemudian di tanggal 13 April 2020, pemerintah kemudian memberlakukan pembatasan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1), mencakup kebijakan peliburan sekolah, tempat kerja, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagai langkah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 (Indonesia. Pemerintah Pusat, 2020).

Kemudian, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim, mengeluarkan surat edaran tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan Pendidikan selama masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19). Surat edaran ini mewajibkan kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pembelajaran daring/jarak jauh atau belajar dari rumah (Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Keputusan tersebut memiliki dampak besar pada seluruh sektor Pendidikan. Keputusan ini tidak hanya memengaruhi siswa, tetapi juga guru dan orang tua yang harus beradaptasi dengan perubahan mendalam dalam cara belajar. Pandemi menciptakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa semua pihak terlibat dalam dunia Pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan model pembelajaran yang baru dan bukan merupakan hal yang umum atau biasa dilakukan dalam Pendidikan di Indonesia.

Namun, proses penyesuaian kegiatan Pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang tidak mudah untuk diatasi. Krisis yang terjadi muncul ketika siswa, guru, dan orang tua tidak siap menghadapi pembelajaran jarak jauh. Hasil survei UNICEF mengenai kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi menunjukkan bahwa siswa menginginkan kembali ke sekolah, dengan sekitar dua pertiga (66 persen) menyatakan ketidaknyamanan mereka dalam belajar dari rumah, dan mayoritas (87 persen) menyatakan keinginan untuk segera kembali ke sekolah (UNICEF, 2020).

Situasi pandemi Covid-19 memunculkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama. Pertama, dalam segi aktivitas belajar, mahasiswa menghadapi masalah pemahaman materi yang kurang, pembelajaran yang dirasakan tidak efektif dan kurang interaktif, ketidaksesuaian waktu pelaksanaan belajar dengan jadwal yang ada, dan kesulitan mengakses berbagai sumber belajar. Kedua, aspek teknologi mencakup hambatan seperti keterbatasan jaringan internet, kuota internet yang terbatas, dan keterbatasan perangkat belajar. Sementara itu, aspek pribadi dan lingkungan melibatkan kondisi lingkungan belajar yang tidak kondusif, kehilangan motivasi, kurangnya fokus, masalah kesehatan, dan beban biaya yang signifikan. Saat masyarakat diharuskan tinggal di rumah selama pandemi, lingkungan yang digunakan untuk PJJ menjadi lebih ramai dan kurang kondusif, mempengaruhi fokus dan motivasi mahasiswa selama proses belajar. Hal ini menjadi tantangan tambahan karena pembelajaran daring membutuhkan tingkat kemandirian yang tinggi dan kemampuan belajar mandiri (Cerelia et al., 2021).

Dalam siaran pers pada tanggal 7 Agustus 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim, juga menguraikan kendala-kendala dalam Pendidikan selama pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. Terdapat tiga kelompok yang mengalami kendala, yaitu guru, orang tua, dan siswa. Beberapa kendala guru melibatkan kesulitan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, fokus pada penyelesaian kurikulum, pembatasan waktu mengajar, dan kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra kegiatan belajar mengajar di rumah. Orang tua menghadapi kendala karena keterbatasan waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah dan juga kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi kegiatan belajar selama di rumah. Sementara itu, siswa mengalami kesulitan berkonsentrasi selama belajar dari rumah, merasa

terbebani oleh tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan mengalami peningkatan tingkat stres dan kejenuhan akibat isolasi berkepanjangan, yang dapat menyebabkan rasa cemas dan depresi pada anak-anak. Dari ketiga kelompok tersebut juga mengalami kendala dalam mengakses sumber belajar, baik karena masalah jangkauan listrik ataupun internet yang kurang begitu memadai, dan juga akses kuota internet yang membutuhkan dana yang tidak begitu sedikit untuk melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 (Makarim, 2020).

Kemudian, dengan adanya *crisis* yang terjadi tersebut, sebagai proses *redressive*-nya, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang melibatkan empat kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, dan Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat keputusan bersama ini berkaitan dengan perubahan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dalam kondisi pandemi COVID-19. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan panduan yang jelas terkait penyelenggaraan pendidikan di tengah kondisi krisis kesehatan ini (Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Kementerian Agama. Menteri Kesehatan. Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Surat keputusan tersebut mengubah kebijakan sebelumnya yang memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah hanya di zona hijau berdasarkan data satuan tugas penanganan covid-19 nasional, dan sekarang diperluas hingga mencakup zona hijau dan kuning. Meskipun ada perubahan dalam kebijakan, prosedur pengambilan keputusan untuk pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat, sesuai dengan surat keputusan sebelumnya. Pemda, kantor, atau kanwil Kemenag, bersama dengan sekolah, memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya siap untuk memulai pembelajaran tatap muka, dan juga walaupun daerah telah masuk zona hijau atau kuning, izin dari pemda telah diberikan, dan sekolah telah mengadakan pembelajaran tatap muka, orang tua atau wali tetap memiliki hak untuk memutuskan apakah anak mereka akan tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah atau belajar ke sekolah (Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Kementerian Agama. Menteri Kesehatan. Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Surat tersebut mengubah peraturan kurikulum Pendidikan di Indonesia dengan memperkenalkan kurikulum darurat, yang mengimplikasikan penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Penyederhanaan ini mengarah pada fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat yang diperlukan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat berikutnya. Satuan Pendidikan diberi opsi untuk memilih dari tiga pelaksanaan kurikulum, yaitu tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, mengadopsi kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara independen. Dengan penerapan kebijakan kurikulum ini, diharapkan dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan siswa selama pandemi (Makarim, 2020)..

Untuk mendukung keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi peraturan bagi guru. Kebijakan ini mencabut kewajiban bagi guru untuk memenuhi beban kerja tatap muka selama 24 jam dalam satu minggu, memberi kesempatan bagi guru untuk lebih fokus memberikan pembelajaran interaktif kepada siswa tanpa harus terikat dengan pencapaian jam yang telah ditentukan. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan Pendidikan dalam kondisi khusus (Makarim, 2020).

Namun, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai harapan. Setelah berlalu satu tahun sejak kebijakan diberlakukan, masih ada sejumlah masalah yang dihadapi. Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa tidak semua daerah mampu menindaklanjuti kebijakan dari pusat yang dapat mengimbangi aspek pembelajaran dan konteks daerah secara optimal. Kebijakan turunan di tingkat daerah cenderung bersifat umum dan kurang rinci. Sebagian besar hanya memberikan panduan umum tentang pembukaan dan penutupan sekolah tanpa memberikan instruksi yang lebih rinci. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat serta instansi terkait lainnya. Terlebih lagi, kebijakan turunan ini belum sepenuhnya menghasilkan implementasi yang diharapkan. Ditemukan juga keterbatasan dalam program-program pemerintah daerah, terutama karena keterbatasan anggaran. Hampir di seluruh daerah, masalah besar muncul dalam pelaksanaan pembelajaran daring, terutama karena terbatasnya fasilitas dan dukungan (sinyal, kuota, perangkat), serta keterbatasan guru dalam menggunakan metode pengajaran jarak jauh. Dari banyak faktor yang memengaruhi implementasi, dua faktor yang paling signifikan adalah

keterbatasan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan infrastruktur melibatkan pembelajaran daring (sinyal, kuota, internet) dan luring, serta pembelajaran tatap muka (sarana pendukung protokol kesehatan). Sementara itu, keterbatasan SDM terjadi pada guru dalam memberikan pengajaran dan pada orang tua dalam memberikan pendampingan (Pramana et al., 2021).

Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak siswa di Indonesia, terutama di kelas 1, 2, dan 3, belum mencapai tingkat pembelajaran yang diharapkan sesuai standar internasional maupun nasional. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan memperburuk kesenjangan pembelajaran, terutama bagi siswa yang sudah dalam kondisi paling rentan (Spink et al., 2022).

Hasil studi juga menunjukkan bahwa siswa di daerah perdesaan dan terpencil mengalami kesulitan lebih besar. Sekolah di wilayah tersebut sering kekurangan sumber daya dan dukungan profesional, dan guru di sana cenderung memiliki kualifikasi yang lebih rendah. Hal ini semakin memperparah situasi bagi siswa dengan identitas tertentu, seperti mereka yang rentan karena disabilitas, menggunakan bahasa ibu bukan bahasa Indonesia, atau memiliki gender tertentu. Selain itu, lokasi perdesaan dan terpencil juga dapat menjelaskan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, yang membatasi kemampuan mereka untuk membantu anak-anak dalam pembelajaran. Kendala ekonomi dan status sosial yang rendah juga sering berkaitan dengan kendala lain, seperti sulitnya membeli perangkat dan mendapatkan akses internet, terutama selama penutupan sekolah saat pandemi COVID-19 (Pascoe et al., 2022).

Berdasarkan rekomendasi dari laporan tersebut, langkah pertama yang penting adalah memberikan dukungan sistemik untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dalam literasi dan numerasi, melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan kerugian pembelajaran yang lebih lanjut (Spink et al., 2022).

Kemudian, berdasarkan hasil temuan di berbagai daerah, serta beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, dan hasil pembelajaran dari perubahan kurikulum sebelumnya, Kemendikbudristek kemudian mengeluarkan kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini mencakup beberapa hal, seperti menetapkan apa yang harus dipelajari siswa melalui Profil Pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran, memberikan panduan pembelajaran melalui dokumen prinsip pembelajaran dan asesmen, serta memberikan dukungan bagi guru melalui sumber daya seperti modul ajar dan buku pelajaran di platform Merdeka Belajar (Randall et al., 2022).

Kurikulum ini disusun agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, termasuk opsi implementasi yang dapat dipilih oleh sekolah berdasarkan sumber daya dan kapasitas mereka. Kemendikbudristek akan melakukan pemantauan terhadap implementasi dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari sekolah dan pihak lain. Implementasi ini juga mencakup penyesuaian standar dan peraturan, pelatihan serta dukungan bagi guru melalui inisiatif seperti Sekolah Penggerak dan SMK PK, serta penyediaan perangkat pembelajaran. Selain fokus pada kurikulum, program-program ini bertujuan meningkatkan seluruh sistem pembelajaran (Randall et al., 2022). Dengan adanya kebijakan kurikulum baru ini, diharapkan terjadi peningkatan kondisi Pendidikan pasca krisis pandemi di Indonesia.

Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, hasil pemantauan menunjukkan bahwa guru dan sekolah masih menghadapi tantangan dan juga beberapa permasalahan. Tantangan ini terjadi karena Kurikulum Merdeka memerlukan perubahan pola pikir dan keterampilan teknis dari guru dan sekolah dalam proses belajar-mengajar, seperti kemampuan melakukan pembelajaran berbeda untuk setiap siswa dan asesmen awal untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Namun, kendala material dan dukungan sumber daya dari pemerintah juga membatasi kemampuan sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Sukoco et al., 2023).

Meskipun mengalami beberapa permasalahan dalam penerapan kurikulum yang baru, terlihat indikasi adanya pemulihan pembelajaran, walaupun kesenjangan pembelajaran masih terjadi di masyarakat. Faktor-faktor seperti penggunaan kurikulum yang disesuaikan, pembelajaran yang differensiasi, serta asesmen berkala dan penggunaan hasil asesmen dapat membantu dalam pemulihan pembelajaran. Sekolah yang menerapkan praktik-praktik ini cenderung memiliki hasil pemulihan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menerapkannya. Praktik-praktik ini sejalan dengan esensi Kurikulum Merdeka. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pengembangan diri guru, monitoring rutin oleh kepala sekolah, dan dukungan konsisten dari pemerintah daerah juga berkontribusi pada pemulihan pembelajaran. Ditemukan juga beberapa faktor lain yang mungkin dapat berkontribusi dalam mempercepat pemulihan pembelajaran, seperti dukungan dari Lembaga swadaya masyarakat dan juga dukungan dari orang tua atau keluarga siswa. Hal ini menunjukkan

bahwa upaya pemulihan pembelajaran perlu dilakukan secara kolektif dan menyeluruh, dengan dukungan yang memadai dari sekolah dan pemangku kepentingan daerah untuk menjadikan implementasi Kurikulum Merdeka lebih efektif dan juga memajukan Pendidikan yang ada di Indonesia (Sukoco et al., 2023).

4. Kesimpulan

Dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan dan mengikuti model social drama menurut Turner, terlihat bagaimana proses sosial selama pandemi di bidang Pendidikan di Indonesia. Dimulai dari munculnya breach akibat pandemi COVID-19, yang mengakibatkan sekolah ditutup dan beralih ke pembelajaran daring, hal ini yang kemudian memaksa penyesuaian kegiatan pembelajaran dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan keluarga siswa. Krisis kemudian terjadi ketika beberapa pihak sulit beradaptasi dengan situasi baru ini. Siswa menghadapi kesulitan belajar di rumah dan ingin kembali ke sekolah. Guru dan orang tua juga mengalami kesulitan dengan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah kemudian mencoba mengatasi krisis dengan kebijakan baru, seperti perluasan zona pembelajaran tatap muka dan kurikulum darurat. Meskipun demikian, setelah setahun penerapan kebijakan baru, masih ada berbagai permasalahan di semua elemen Pendidikan. Siswa belum mencapai tingkat pembelajaran yang diharapkan, dan pandemi diperkirakan akan memperburuk kesenjangan pembelajaran, terutama bagi siswa paling rentan. Oleh karena itu, pemerintah, terutama Kemendikbudristek, mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, untuk mengatasi permasalahan Pendidikan di Indonesia. Meskipun masih terdapat kesenjangan pembelajaran yang ada di masyarakat, namun terlihat ada tanda-tanda pemulihan pembelajaran yang terjadi. Faktor pembentukan kurikulum merdeka dianggap sebagai salah satu faktor pemulihan, bersama dengan pengembangan diri guru, monitoring oleh kepala sekolah, dan dukungan konsisten dari pemerintah daerah. Beberapa faktor lain, seperti dukungan dari LSM dan keluarga siswa, juga dianggap dapat mempercepat pemulihan pembelajaran. Meskipun, dalam penerapannya, Kurikulum Merdeka masih dihadapi oleh sejumlah tantangan dan permasalahan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa pemulihan pembelajaran perlu dilakukan secara bersama-sama dan menyeluruh, dengan dukungan yang memadai dari sekolah dan pemangku kepentingan daerah untuk menjadikan implementasi Kurikulum Merdeka lebih efektif dan memajukan Pendidikan di Indonesia.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bagaimana model social drama Turner menunjukkan proses sosial di masyarakat saat krisis, berbeda dengan pandangan fungsionalisme yang hanya fokus pada fungsi dan sistem masyarakat secara umum tanpa memperhatikan hubungan antar elemen. Kelebihan dari model social drama terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan analisis krisis masyarakat secara produktif. Tidak perlu mengikuti setiap fase secara linear yang ada di model tersebut, sebagai contoh, social drama dapat melibatkan serangkaian breach sebelum akhirnya krisis muncul, tidak hanya satu breach saja. Krisis juga bisa mereda sejenak sebelum muncul kembali akibat pelanggaran kecil, memengaruhi dinamika krisis tersebut (Torresan, 2021). Meskipun demikian, tidak ada yang salah dengan mengambil kedua pandangan tersebut. Yang penting adalah bagaimana pandangan tersebut digunakan untuk melihat dan menganalisis peristiwa dalam masyarakat.

Referensi

- Azhara, R. R. A., & Kartini, D. S. (2022). Peranan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 pada Bidang Pendidikan di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1432-1440
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T. (2021). Learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 di Indonesia. In *E-Prosiding Seminar Nasional Statistika| Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran* (Vol. 10, pp. 27-27)
- Flis, M. (1992). Malinowski and Radcliffe-Brown: Two Versions of Functionalism. *The Polish Sociological Bulletin*, (97), 35-43
- Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Kementerian Agama. Menteri Kesehatan. Kementerian Dalam Negeri. (2020). Surat Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta

- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2020). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta
- Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus Corona. Jakarta
- Makarim, Nadiem. (2020). Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/c4c7ec76db850c3>
- Nuraini, R. (2020). Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id//narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik?lang=1>
- Pascoe, F., Sukoco, G.A., Arsendy, S., Octavia, L., Purba, R., Sprunt, B., Bryant., C. 2022. Kesenjangan yang Semakin Melebar: Dampak Pandemi COVID-19 pada Siswa dari Kelompok paling Rentan di Indonesia. Jakarta: INOVASI
- Pramana, R., Alifia, U., & Amin, G. 2021. Kesiapan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di 10 Kabupaten. Jakarta: INOVASI
- Randall, R., Sukoco, G.A., Heyward, M., Purba, R., Arsendy, S., Zamjani, I., Hafiszha, A. 2022. Mereformasi Kurikulum Indonesia: Bagaimana Kurikulum Merdeka Bertujuan untuk Mengatasi Learning Loss dan Meningkatkan Hasil Belajar dalam Literasi dan Numerasi. Jakarta: INOVASI
- Spink, J., Cloney, D., Berry., A. 2022. STUDI KESENJANGAN PEMBELAJARAN – 1 Tak Sekadar Huruf dan Angka: Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Kemampuan Literasi dan Numerasi Dasar Siswa di Indonesia. Jakarta: INOVASI
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29-39
- Sukoco, G.A., Arsendy, S., Purba, R.E., Zulfa, A.H. 2023. Bangkit lebih kuat: Pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19: Studi kasus INOVASI. Jakarta: INOVASI
- Torresan, A. (2021). Postcolonial social drama: The case of Brazilian dentists in Portugal. *Critique of Anthropology*, 41(2), 165-186
- Turner, V. (1974). *Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*. Cornell University Press
- Turner, V. (1979). Dramatic ritual/ritual drama: Performative and reflexive anthropology. *The Kenyon Review*, 1(3), 80-93
- Turner, V. (1982). Images of anti-temporality: An essay in the anthropology of experience. *Harvard Theological Review*, 75(2), 243-265
- UNICEF. (2020, 16 Juni). Indonesia: Survei terbaru menunjukkan bagaimana siswa belajar dari rumah. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-survei-terbaru-menunjukkan-bagaimana-siswa-belajar-dari-rumah>
- Update Corona 10 April: 3.512 Kasus Positif, 306 Meninggal. (2020, 10 April). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200410130423-20-492352/update-corona-10-april-3512-kasus-positif-306-meninggal>

How Cites

Mayadi, A. (2023). Fungsionalisme dan Social Drama (Studi Kasus Kondisi Pendidikan di Indonesia Selama Masa Pandemi COVID-19). *Jurnal Aktual Pendidikan Indonesia*, 2(2), 35–43. <https://doi.org/10.58477/api.v2i2.139>

Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/api>.